



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUL HARIADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 809138

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.815.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m²/41 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m²/41 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/240 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000.000
4. Tanah Seluas 1.055 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 3.223 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
6. Tanah Seluas 487 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 529.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, WULING ALMAZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 352.000.000



3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
23.500.000
4. MOBIL, VINFAST CITY CAR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 342.515.235

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.688.015.235

III. HUTANG Rp. 250.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.438.015.235

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.